

Garaf-13

Disparitas antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016

Pujawati¹, Hailuddin Bd¹, dan Eka Agustiani¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

*email korespondensi : feryanlin@yahoo.co.id

Info Artikel

ABSTRAK

Kata Kunci:
Kapasitas fiskal,
Kebutuhan fiskal,
Derajat desentralisasi,
Rasio kemandirian

Penelitian tentang Disparitas antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016, bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan kapasitas fiskal Kabupaten Lombok Timur dalam memenuhi pembangunan daerahnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis dengan perhitungan kapasitas fiskal, derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan kebutuhan fiskal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fiscal Capacity Lombok Timur selama 6 tahun menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun cenderung menurun. Hal ini mencerminkan kemampuan keuangan yang semakin berkurang, artinya Lombok Timur masih belum dapat meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh sumber keuangan. Ini semua terlihat dari rasio kemandiriannya yang termasuk dalam kategori kurang mandiri, rasio ketergantungannya masih sangat tinggi pada bantuan dana pemerintah pusat, serta kebutuhan fiskal daerah yang terus mengalami peningkatan tiap tahun. Dengan hasil analisis tersebut, pemerintah daerah mesti terus konsisten menggali sumber-sumber fiskal yang dimiliki, terutama yang terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi keberlangsungan pembangunan daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan upaya terpadu yang menggabungkan beberapa dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang ada. Tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah pembangunan daerah disektor ekonomi

yang perumusan dan pelaksanaannya tetap berpegang pada tujuan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002: 221).

Setelah realisasi otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dan pemerintah pusat akan membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin di laksanakan

Vol. 1 No. 1, Nopember 2018

**Disparitas antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016**

Pujawati¹, Hailuddin Ba¹, dan Eka Agustiani¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

*email korespondensi : feryanlin@yahoo.co.id

Info Artikel

ABSTRAK

*Kata Kunci:
Kapasitas fiskal,
Kebutuhan fiskal,
Derajat desentralisasi,
Rasio kemandirian*

Penelitian tentang Disparitas antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016, bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan kapasitas fiskal Kabupaten Lombok Timur dalam memenuhi pembangunan daerahnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis dengan perhitungan kapasitas fiskal, derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan kebutuhan fiskal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fiscal Capacity Lombok Timur selama 6 tahun menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun cenderung menurun. Hal ini mencerminkan kemampuan keuangan yang semakin berkurang, artinya Lombok Timur masih belum dapat meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh sumber keuangan. Ini semua terlihat dari rasio kemandiriannya yang termasuk dalam kategori kurang mandiri, rasio ketergantungannya masih sangat tinggi pada bantuan dana pemerintah pusat, serta kebutuhan fiskal daerah yang terus mengalami peningkatan tiap tahun. Dengan hasil analisis tersebut, pemerintah daerah mesti terus konsisten menggali sumber-sumber fiskal yang dimiliki, terutama yang terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi keberlangsungan pembangunan daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan upaya terpadu yang menggabungkan beberapa dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang ada. Tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah pembangunan daerah disektor ekonomi

yang perumusan dan pelaksanaannya tetap berpegang pada tujuan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002: 221).

Setelah realisasi otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dan pemerintah pusat akan membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin di laksanakan

mempercepat pembangunan di daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang dan sebagainya (Mahmudi, 2016: 134).

2). Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kemudian kebutuhan fiskal daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Untuk membiayai kebutuhan keuangan (kebutuhan fiskal) yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu daerah, disini pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk dana perimbangan.

Dana perimbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengeloan dan pengawasan keuangannya (Mardiasmo, 2002: 132).

Kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut (Chodariyanti, 2015:680):

- a. Kapasitas Fiskal, menggambarkan kemampuan perekonomian daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai daerahnya sendiri.
- b. Derajat Desentralisasi, dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total

penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

- c. Rasio Kemandirian, dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah bantuan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.
- d. Rasio Ketergantungan, dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.
- e. Kebutuhan fiskal, yaitu mengukur seberapa besar kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Semakin tinggi indeks, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar.

III. METODOLOGI

1. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal dan kemampuan keuangan pada suatu daerah. Pendekatan kuantitatifnya memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia, yang disebut sebagai variabel (Sujarweni, 2014: 11).

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, dengan pertimbangan bahwa penerimaan dana perimbangan daerah ini paling besar selama tahun 2011-2016 dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di Provinsi NTB. Selain itu jumlah penduduknya yang paling besar dengan angka kemiskinannya masih besar, dan IPM yang masih rendah.

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi kepustakaan. Jenis

datanya adalah data sekunder, antaranya; a) Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), b) Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan c) Data jumlah penduduk.

Beberapa variabel yang berkaitan dengan penelitian ini antaranya adalah:

- 1). Kapasitas Fiskal, yang berkaitan dengan PDRB dan jumlah penduduk.
- 2). Derajat Desentralisasi, berkaitan dengan PAD dan Total Pendapatan Daerah (TPD).
- 3). Rasio Kemandirian, berkaitan dengan PAD dan Dana perimbangan.
- 4). Rasio Ketergantungan, berkaitan dengan Pendapatan Transfer (dari pusat dan provinsi), dan TPD.
- 5). Kebutuhan Fiskal, berkaitan dengan jumlah penduduk dan Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung).

2. Analisis Data

Beberapa alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antaranya:

1. Kapasitas Fiskal

Untuk menggambarkan kemampuan perekonomian daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi nilainya, maka kapasitas fiskal suatu daerah semakin baik. Formulasnya (Reksohadiprojo, 2013:156) adalah;

$$FC = \frac{\text{Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)} / \sum \text{Penduduk}}{\text{Kapasitas Fiskal Standar (KFs)}} \times 100$$

$$KFs = \frac{\sum \text{PDRB} / \text{Penduduk}}{\sum \text{Kecamatan}}$$

Keterangan:

FC = *Fiscal Capacity* (kapasitas fiskal)
 PDRB = Produk Domestik Regional Bruto
 KFs = Kapasitas Fiskal Standar

2. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2017: 140). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi

No	Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi
1	0,00 – 10,00	Sangat Kurang
2	10,01 – 20,00	Kurang
3	20,01 – 30,00	Sedang
4	30,01 – 40,00	Cukup
5	40,01 – 50,00	Baik
6	>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri

3. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan dana perimbangan. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah makin mandiri keuangannya (Mahmudi, 2016: 140). Formula perhitungannya;

$$\text{Rasio kemandirian daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan (DP)}} \times 100$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

No	Porsi PAD pada Dana Perimbangan	Tingkat Kemandirian Keu. Daerah
1	0,00 – 10,00	Sangat Kurang
2	10,01 – 20,00	Kurang
3	20,01 – 30,00	Cukup
4	30,01 – 40,00	Sedang
5	40,01 – 50,00	Baik
6	>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri

4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer (Mahmudi, 2017: 140). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer (PT)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

No	Prosentase PT terhadap TPD	Tingkat Ketergantungan
1	0,00 – 10,00	Sangat Rendah
2	10,01 – 20,00	Rendah
3	20,01 – 30,00	Sedang
4	30,01 – 40,00	Cukup
5	40,01 – 50,00	Tinggi
6	>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri

5. Kebutuhan fiskal

Kebutuhan fiskal yaitu mengukur kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Semakin tinggi indeks, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar (Chodariyanti, 2015: 680), dengan formula (Reksohadiprodjo, 2013: 155).

$$IPP = \frac{\text{Pengeluaran Aktual per Kapita untuk jasa-jasa Publik (PPP)}}{\text{Standar Kebutuhan Fiskal Daerah (SKF)}} \times 100$$

$$SKF = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Daerah/jumlah penduduk}}{\sum \text{Kecamatan}}$$

Keterangan:

IPP = Indeks Pelayanan Publik perkapita

PPP = Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan daerah

SKF = Standar Kebutuhan Fiskal

IV. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Daerah Penelitian

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah 2.679,88 km², (daratan 59,91% dan lautan 40,09%). Dengan luas tersebut Lombok Timur dihuni oleh 1.173.781 jiwa dengan kepadatan rata-rata 731 jiwa/ km². (BPS Lombok Timur 2016). Secara administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 Kecamatan 254 desa/kelurahan dengan batas administrasi sebagai berikut: Sebelah Utara, Laut Jawa; Sebelah Selatan, Samudra Indonesia, Sebelah Barat, Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Utara, dan Sebelah Timur, Selat Alas.

Perekonomian Lombok Timur masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sumber pendapatan daerah dan mata pencaharian penduduk.

2. Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.

A. Perkembangan Pendapatan.

Pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur terdiri dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan transfer yang diterima meliputi

pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi. Berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur selama 6 tahun:

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur (Rupiah)

No	Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendap. yg Sah	Jumlah Pendapatan
1	2011	56.005.500.000	1.068.462.790.000	2.876.650.000	1.127.344.930.000
2	2012	88.007.660.000	1.166.884.010.000	21.175.000.000	1.276.066.660.000
3	2013	67.503.010.000	1.329.553.280.000	7.847.470.000	1.404.903.750.000
4	2014	180.308.190.000	1.505.439.310.000	8.034.030.000	1.693.781.530.000
5	2015	218.906.890.000	1.780.746.630.000	8.221.080.000	2.007.874.610.000
6	2016	236.147.470.000	1.980.711.120.000	6.948.370.000	2.223.806.970.000

Sumber: DISPENDA Kabupaten Lombok Timur (Data diolah)

Secara total pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur enam tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti tiap tahunnya. Tahun 2011 total pendapatan Lombok Timur mencapai Rp.1.127.344.940.000,- Namun pada tahun 2016 sudah mencapai Rp.2.223.806.970.000,- atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 14,63 persen pertahun.

Peningkatan pendapatan pada tahun-tahun yang bersangkutan disebabkan oleh semakin meningkatnya pendapatan daerah dari komponen dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Namun dari ketiga komponen tersebut, lain-lain pendapatan yang sah mengalami fluktuasi selama 2011-2016. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah pada tahun tersebut tidak mendapatkan pendapatan dana hibah dan dana darurat.

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa kontribusi yang besar untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi masih berasal dari APBN baik dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Hal ini mencerminkan Kabupaten Lombok Timur masih sangat tergantung bantuan dana dari pemerintah pusat. Dengan keadaan tersebut maka dana yang ada sudah semestinya dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya yang lebih maju dan nyata guna meningkatkan pendapatan daerah

terutama pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur.

B. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi PAD Lombok Timur selama 6 tahun sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi PAD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016 (Rupiah)

No	Tahun	Pajak	Retribusi	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang sah	Jumlah PAD
1	2011	27.633.982.000	25.446.700.000	4.277.340.000	8.844.170.000	66.202.192.000
2	2012	35.085.110.000	37.928.750.000	10.954.700.000	15.287.300.000	109.255.860.000
3	2013	26.037.350.000	24.999.410.000	10.954.700.000	15.287.300.000	77.278.760.000
4	2014	44.055.050.000	35.141.700.000	15.203.700.000	15.287.300.000	109.687.750.000
5	2015	48.156.910.000	52.072.850.000	19.614.770.000	16.547.000.000	136.391.530.000
6	2016	48.156.910.000	52.072.850.000	19.614.770.000	16.547.000.000	136.391.530.000

Sumber: DPNP/MDA Kabupaten Lombok Timur (Data diolah)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa gambaran mengenai perkembangan PAD selama enam tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun 2011 realisasi PAD sebesar Rp.56.005.500.000,- dan meningkat menjadi Rp.236.147.470.000,- pada tahun 2016, atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 46,074 persen pertahun, meskipun terjadi penurunan tahun 2013. Penurunan ini disebabkan penerimaan lain-lain yang sah (pendapatan hibah dan pendapatan darurat) yang relatif kecil (hanya Rp.8.844.170.000,-) namun komponen PAD yang lain tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun berikutnya secara berturut-turut meningkat lagi.

C. Perkembangan Belanja Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan diatas, selanjutnya dialokasikan dalam bentuk belanja daerah yang terbagi dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung Lombok Timur selama masa kajian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur 2011-2016 (Rupiah)

No	Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja Daerah
1	2011	914.349.680.000	168.795.640.000	1.083.145.320.000
2	2012	974.921.260.000	185.134.020.000	1.160.055.280.000
3	2013	1.107.249.210.000	217.813.290.000	1.325.062.500.000
4	2014	1.177.600.140.000	446.683.340.000	1.624.283.480.000
5	2015	1.189.984.450.000	469.315.930.000	1.659.300.380.000
6	2016	1.492.274.080.000	747.566.260.000	2.239.840.340.000

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan data realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa total belanja daerah pada setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2011. Dari nilai Rp.1.083.145.320.000,- pada tahun 2011 menjadi Rp.2.239.840.340.000,- tahun 2016 dengan rata-rata peningkatan sebesar 16,209 persen pertahun. Dari kedua komponen belanja daerah diatas, realisasi belanja tidak langsung lebih besar dari komponen belanja langsung. Hal ini disebabkan karena sudah umum terjadi di daerah-daerah bahwa belanja tidak langsung lebih banyak untuk kebutuhan pegawai seperti untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan keuangan dan belanja sosial.

D. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan total nilai produksi barang dan jasa pada suatu daerah dalam periode tertentu. Nilai PDRB ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat kondisi perekonomian pada suatu daerah. Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu atas dasar harga (ADH) berlaku, dan atas dasar harga (ADH) konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ketahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi faktor harga, maka digunakan PDRB atas dasar

punya prospek antaranya sektor pertanian dan kelautan, pariwisata, pemberdayaan UMKM, dan sektor jasa umumnya.

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sehingga alokasinya tepat guna dan untuk mengurangi kebocoran anggaran. Perencanaan belanja (pengeluaran) juga harus diarahkan untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi.
3. Pemda juga perlu terus melakukan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan pelayanan dan transparansi, sehingga memudahkan para investor untuk berusaha di Lombok Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Anonim. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011. *Tentang Pinjaman Daerah*.
- Anonim. 2011-2016. Kabupaten Lombok Timur dalam angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur.
- Anonim. 2011-2016. Kabupaten Lombok Timur dalam angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Anonim. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Chodariyanti, Laily. 2015. *Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan*. Jurnal. Universitas Islam Lamongan.
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2016. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonom*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Nurulliawati. 2017. *Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010-2015*. Skripsi. Universitas Mataram.
- Reksohadiprojo, Sukanto. 2013. *Ekonomi Publik*. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta.
- Rosmawati, Sri dan M.Rachmad R dan Zamzami, 2016. *Analisis Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal serta Hubungannya dengan Belanja Pegawai di Kabupaten Tebo*. Jurnal. Universitas Jambi.
- Simanjuntak, Robert A. 2003. *Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, dan Optimalisasi Potensi PAD*. Jurnal.
- Solihin, Achmad dan Niken Ajeng Lesatri, 2010. *Analisis Ketimpangan Fiskal Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah*. Jurnal.
- Sriningsih, Siti. 2013. *Analisi Ketimpangan Fiskal Pasca Otonomi Daerah*. Jurnal. Universitas Mataram.
- Sriyana, Jaka. 2009. *Analisis Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal. Universitas Islam Indonesia.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (Mixed Methods)*. ALFABETA. Bandung
- Sujarweni, V.Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kencana. Jakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Pubik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Widani, Krisnanda Cok istri dan Ni Made Adi Erawati, 2016. *Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada*